

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PEREMPUAN USAHA MIKRO (PUM) DI KAWASAN PESISIR SULAWESI TENGGARA

Hartina Batoa¹⁾, Putu Arimbawa¹⁾, Munirwan Zani¹⁾,
Awaluddin Hamzah¹⁾ dan Muhammad Aswar Limi¹⁾

¹Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari
Email : hartina_batoa@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Perempuan Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan pada lima kabupaten/kota yang ditentukan secara purposive dengan pertimbangan karakteristik wilayah dan usaha masyarakat yang umumnya bergelut pada subsektor perikanan. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Muna Barat, Konawe Selatan, Kolaka, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan PUM dan data sekunder berasal dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam, yaitu observasi dan wawancara. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga PUM dilakukan dengan penentuan skor berdasarkan indikator kesejahteraan. Selanjutnya dari skor tersebut dilakukan penentuan tingkat kesejahteraan yaitu kurang sejahtera (skor < 52), cukup sejahtera (skor 52 – 60) dan sejahtera (skor > 60)

Hasil analisis dan mengacu pada tujuan penelitian maka dapat diketahui bahwa kesejahteraan PUM masih tergolong rendah. PUM di Sulawesi Tenggara yang telah menikmati hasil usahanya dan telah tergolong sejahtera baru sekitar 9%, sedangkan yang tergolong cukup sejahtera yakni 40%. Jumlah yang lebih besar adalah PUM yang dikategorikan kurang sejahtera dimana angkanya mencapai 51%.

Kata kunci : *Tingkat Kesejahteraan, Rumah Tangga PUM, Pesisir, Sulawesi Tenggara*

1. PENDAHULUAN

BPS (2002) mencatat pertumbuhan secara kuantitatif jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia mencapai 40.137.773 (99,86 %) dari total jumlah 40.197.610 pelaku usaha, sementara pelaku usaha mikro mencapai 97,6 persen dari jumlah pelaku usaha kecil. BPS 2007 mencatat jumlah perempuan yang berada pada areal usaha kecil dan mikro menempati porsi yang besar. Diperkirakan pada tahun 2010 jumlah usaha mikro telah mencapai 41,3 juta unit usaha, dan kurang lebih sebanyak 43% dikelola oleh perempuan. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah, mengingat angka tersebut didata hanya berdasarkan kriteria formal kepemilikan usaha, misalnya jumlah tenaga kerja, besarnya modal, NPWP dan nama kepala keluarga laki-laki.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangannya terbukti menjadi pilar kekuatan ekonomi dan semakin terus menjadi pusat perhatian dan target pembinaan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Walaupun secara khusus data pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota tidak tersedia secara detail, namun data UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini berjumlah 198.262 unit usaha atau menempati porsi 99,8% dari total unit usaha yang ada (Sensus Ekonomi BPS Tahun 2006). Keberadaan UMKM tersebut diharapkan dapat menjadi lokomotif sektor riil yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Usaha mikro menjadi tumpuan harapan perempuan dalam bentuk Perempuan Usaha Mikro (PUM), karena jenis usaha ini tidak memerlukan pendidikan khusus, jam kerja yang fleksibel dan bisa menjadi pengusaha dan pekerja sekaligus. Kelenturan usaha semacam ini menyebabkan usaha ini bisa bertahan pada masa krisis dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja.

Keberadaan PUM pada masyarakat pesisir sangat unik untuk diamati karena mengingat kehidupan masyarakat pesisir sebagian besar bergantung hidupnya dari hasil laut. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi

perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun dalam penelitian ini definisi masyarakat pesisir hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek.

Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak. Kegiatan usaha masyarakat pesisir khususnya para wanita/perempuan adalah usaha dagang produk perikanan. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan bersama suami selaku pencari ikan dan isteri sebagai penjual ikan. Kegiatan berdagang ikan yang dilakukan oleh PUM pada masyarakat pesisir hampir dijumpai di setiap daerah khususnya di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut diyakini sudah dilakukan sejak lama. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat pesisir dan PUM di pesisir pada khususnya jauh dari kehidupan yang layak. Potret tersebut dapat dilihat nyata disekitar kita dimana kondisi perumahan dan pendidikan masyarakat pesisir masih jauh dari harapan kehidupan yang layak. Peran sebagai isteri nelayan yang sekaligus sebagai pencari nafkah keluarga membantu suami menjadikan PUM di masyarakat pesisir menarik untuk dikaji. Berdasarkan Hal Tersebut Maka Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Perempuan Usaha Mikro Di Kawasan Pesisir Sulawesi Tenggara.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Perempuan Usaha Mikro

Secara umum bahwa perempuan menghadapi persoalan yang *spesifik gender*, yaitu persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau kelompok orang adalah perempuan. Tidak saja di kalangan laki-laki, tapi kaum perempuan sendiri yang masih banyak tidak menyadari hal tersebut, sehingga memandang tidak perlu persoalan perempuan harus dibahas dan diperhatikan secara khusus. Hal ini terjadi karena mendalamnya penanaman nilai-nilai mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang menganggap sudah kodratnya perempuan sebagai *ratu rumah tangga*, sebagai pengendali urusan domestic saja begitu dominan di masyarakat kita, sehingga adanya pikiran dan keinginan mengenai kesempatan beraktivitas di luar domain rumah tangga dianggap sesuatu yang mengada-ada, sehingga tidak aneh muncul paradigma perempuan tidak perlu sekolah tinggi toh akhirnya hanya akan mengurus sekitar kasur, sumur, dan dapur. (Sri Lestari, 2007).

Kontribusi sektor UMKM dalam meningkatkan PDB Indonesia juga tidak luput dari peran perempuan baik sebagai pelaku usaha (pengusaha) maupun sebagai tenaga kerja. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang UMKM yang dikelola perempuan, tetapi bisa dikatakan bahwa peran perempuan dalam pengembangan sektor UMKM sangat penting. Fenomena wanita bekerja untuk mencari nafkah terjadi karena dorongan kebutuhan, kemauan dan kemampuan serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses wanita atas kesempatan tersebut. Status ekonomi wanita dilihat dari aktivitasnya dalam kegiatan mencari nafkah, akses terhadap faktor produksi, tingkat pendapatan yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga. Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti : warung makan, toko kecil (peracangan), pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun awalnya UMKM yang dilakukan perempuan lebih banyak sebagai pekerjaan sampingan untuk membantu suami dan untuk menambah pendapatan rumah tangga, tetapi bisa menjadi

sumber pendapatan rumah tangga utama apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh (Priminingtyas, 2011).

Peran perempuan sebagai sasaran upaya cukup menonjol. Berdasarkan desain, umumnya upaya tidak membedakan sasaran laki-laki dengan perempuan (71%), sedangkan yang dikhususkan atau diutamakan pada perempuan 29%. Dalam pelaksanaannya, upaya yang sasarnya khusus atau dominan perempuan adalah 56%, seimbang 23% dan yang lebih banyak laki-laki 21%. Upaya dengan sasaran dominan perempuan banyak dijumpai pada upaya yang menggunakan sistem kelompok. Sementara upaya yang didominasi oleh laki-laki umumnya dari sektor perbankan yang biasanya menerapkan sistem perorang. Ada kecenderungan bahwa jenis usaha mikro yang digeluti perempuan adalah bidang perdagangan dan industri pengolahan yang terkait dengan makanan. Hal ini disebabkan usaha tersebut relatif tidak memerlukan keahlian khusus dan umumnya dilakukan di rumah, sehingga mereka dapat sekaligus melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga.

Peranan usaha mikro antara lain dapat meredakan gejolak sosial, menjadi 'katup pengaman' kebutuhan rumah tangga, sebagai alternatif usaha, dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga pelaku usaha mikro. Sedangkan dampak khusus bagi perempuan adalah meningkatkan kondisi ekonomi perempuan khususnya dan ekonomi keluarga pada umumnya, menciptakan lapangan kerja bagi perempuan, serta meningkatkan keberanian perempuan dalam mengemukakan pendapat dan tidak terlalu bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi (SMERU, 2003).

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan modal untuk pengembangan usaha. Umumnya pengelola UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk modal usaha dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena pihak perbankan menganggap UKM tidak layak untuk mendapatkan kredit, karena sektor UMKM sulit berkembang dan adanya kekhawatiran terjadinya kredit macet. (Priminingtyas, 2010).

Perspektif perempuan yang digunakan dalam penelitian ini yang menurut Poerwandari (2000), adalah untuk mengangkat suara-suara perempuan dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman perempuan. Hal ini didasari oleh kondisi riil bahwa perempuan selama ini tidak terbiasa dijadikan subjek dan tidak berani mengungkapkan pengalaman pribadinya, karena itu diperlukan metode khusus dan perspektif yang menjiwai persoalan perempuan

2.2. Kesejahteraan

Kesejahteraan pada umumnya disamakan dengan taraf hidup yang berarti pemenuhan konsumsi seorang individu. Dalam konteks umum keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat materil maupun spiritual. Disamping itu keluarga sejahtera mempunyai hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga, dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Poerwadarminto (1982) pengertian kesejahteraan adalah kemakmuran atau kesenangan hidup dan kemakmuran berarti serba cukup (mewah tidak kekurangan). Selanjutnya menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *dalam* Salini (2001), mengenai pengertian masyarakat sejahtera dinyatakan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang telah terpenuhi segala kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan sebagainya yang bersifat materil. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang meliputi pendidikan, agama, keindahan, kawan, dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 dijelaskan tentang konsep kesejahteraan sosial ekonomi yaitu tata kehidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan bathinia sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (BPS, 2002).

Dari beberapa konsep kesejahteraan di atas, maka tingkat kehidupan sosial ekonomi tertentu dari individu maupun keluarga suatu masyarakat dicapai apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar di suatu negara pada umumnya sama dengan kebutuhan dasar pada negara lain, perbedaannya adalah pada tingkat pemenuhannya dan bukan jenis kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan hidup lainnya sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima seorang individu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sukirno (1985) bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima rumah tangga, makin besar pula konsumsi yang dibelanjakan.

Sasaran akhir pembangunan ekonomi negara kita adalah peningkatan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk. Bila kita kaji tentang kesejahteraan, maka pada prinsipnya ada beberapa faktor yang perlu dilihat sebagai ukuran kesejahteraan, salah satunya adalah pendapatan per kapita. Penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan memiliki kelemahan, salah satu kelemahannya adalah tidak selamanya orang yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi merasakan kesejahteraan, karena banyak faktor lain yang turut menentukan.

Pada hakekatnya tingkat kesejahteraan selain tercermin dalam tingkat pendapatan, juga tercermin dalam pola konsumsi, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Terpenuhinya berbagai faktor tersebut, seperti pendapatan yang tinggi, konsumsi yang tercukupi, pemukiman yang aman, kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang layak maka pada saat itu akan tercipta kesenangan hidup sehingga seseorang akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan (Djojohadikusumo, 1985).

Selanjutnya Tonton (1995) mengemukakan bahwa kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka mereka harus dibantu dan dibimbing agar mampu akses bukan hanya pada aspek ekonomi tetapi mereka juga mampu akses pada aspek pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan aspek agama.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk akan terwujud jika semua kebutuhan masyarakat yang bersangkutan telah terpenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

a. Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Sedangkan indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang diukur melalui angka kematian dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2) Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik, mengingat sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan sumberdaya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Titik berat pembangunan pendidikan formal adalah meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah telah memprogramkan wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian lama usia wajib belajar diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

3) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pada suatu kelompok masyarakat sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat langsung di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam

bidang perekonomian. Sementara untuk melihat gambaran ketenagakerjaan pada suatu kelompok masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah jam kerja, dan pekerja anak (usia 10-14 tahun), serta lapangan usaha dan status pekerjaan.

4) Perumahan dan Lingkungan

Manusia dan alam lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar dan yang buatan manusia. Untuk dapat mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat yang pada akhirnya disebut dengan rumah atau tempat tinggal.

Manusia membutuhkan rumah, disamping sebagai tempat berteduh dan berlindung juga sebagai tempat berkumpul bagi para penghuni yang biasanya satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimilikinya, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan, antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, fasilitas tempat buang air besar, dan juga tempat penampungan kotoran akhir.

Rumah disamping sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi manusia, lingkungan yang aman dan bersahabat merupakan dambaan bagi setiap manusia itu sendiri. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 menggariskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan/pengembangan, pemeliharaan, pemuliaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan adalah guna tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya serta terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.

5) Taraf dan Pola Konsumsi Rumah Tangga

Aspek lain yang perlu dipantau yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberikan aspek pemerataan yang telah dicapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

Berdasarkan indikator kesejahteraan yang dikemukakan BPS tersebut, selanjutnya Nasution dan Barizi *dalam* Tahir (1999) menentukan beberapa indikator kesejahteraan dan memberi skor pada setiap indikator tersebut untuk menentukan kategori tingkat kesejahteraan rumah tangga. Indikator kesejahteraan tersebut terdiri atas :

- a) Pangan meliputi : menu makanan yang sering dihidangkan
- b) Papan meliputi : status pemilikan rumah, luas bangunan/lantai rumah, jenis dinding, jenis lantai, sumber penerangan, sumber air bersih, kepemilikan MCK, jarak rumah ke *septic tank*, ketersediaan ventilasi, dan sistem pembuangan air limbah
- c) Pemilikan barang meliputi : jumlah barang yang dimiliki (Rp)
- d) Pendidikan meliputi : pendidikan anak tertinggi
- e) Kesehatan meliputi : anggota keluarga yang sakit, dan tempat pelayanan kesehatan yang biasa digunakan
- f) Keluarga Berencana (KB) meliputi : pengalaman penggunaan alat kontrasepsi
- g) Komunikasi dalam keluarga meliputi : adanya waktu yang diluangkan dalam setiap harinya untuk komunikasi antar anggota keluarga
- h) Interaksi dengan lingkungan meliputi :seberapa jauh komunikasi dengan tetangga, bentuk partisipasi dalam kegiatan gotong-royong, anggota keluarga yang ikut dalam organisasi kemasyarakatan, peranan isteri dalam kegiatan PKK, Dasawisma, dan lain-lain
- i) Fasilitas dan aksesibilitas meliputi : keadaan keluarga sekarang dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu dan keadaan masyarakat sekitar sekarang dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu

Selanjutnya dikemukakan bahwa berdasarkan total skor dari semua indikator kesejahteraan tersebut maka tingkat kesejahteraan rumah tangga dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a) Kurang sejahtera dengan total skor kurang dari 52 (skor < 52)
- b) Cukup sejahtera dengan total skor 52-60
- c) Sejahtera dengan total skor lebih dari 60 (skor > 60)

b. Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penggolongan tingkat kesejahteraan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meliputi tiga tingkatan, yaitu: (1) Keluarga Pra Sejahtera, (2) Keluarga Sejahtera I, dan (3) Keluarga Sejahtera II. Sedangkan kriteria dari masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria untuk Keluarga Sejahtera II adalah :
 - a) Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah agama secara teratur.
 - b) Paling kurang dalam seminggu keluarga makan daging, ikan/telur.
 - c) Setahun terakhir anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.
 - d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
 - e) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - f) Ada anggota keluarga umur 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.
 - g) Ada anggota keluarga umur 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
 - h) Anak umur 7-15 tahun bersekolah.
 - i) Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak hidup dua atau lebih dan saat ini memakai kontrasepsi.
- 2) Kriteria untuk Keluarga Sejahtera I adalah :
 - a) Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah agama.
 - b) Pada umumnya keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - c) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/bersekolah dan bepergian.
 - d) Bagian lantai yang terluas bukan dari halaman.
 - e) Anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawah ke sarana kesehatan.
- 3) Kriteria untuk mengukur Keluarga Pra Sejahtera adalah apabila salah satu kriteria dari Keluarga Sejahtera I tidak terpenuhi

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lima kabupaten/kota yang ditentukan secara purposive dengan pertimbangan karakteristik wilayah dan usaha masyarakat yang umumnya bergelut pada subsektor perikanan. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Muna Barat, Konawe Selatan, Kolaka, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, PUM di lima kabupaten/kota tersebut mewakili kondisi geografis wilayah dan pencampuran antara kepulauan dan daratan. Kedua, disepanjang pesisir pantai terdapat perempuan usaha mikro yang melakukan usaha-usaha perdagangan dan pengolahan hasil laut. Ketiga, lokasi penelitian di lima kabupaten/kota tersebut masih kuat budaya patriarki, sehingga dengan jelas dapat dilihat upaya perempuan untuk mengembangkan usahan

3.2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan PUM dan data sekunder berasal dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan melalui keterlibatan peneliti secara langsung dalam kehidupan objek, baik di tempat kerja maupun di rumah. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat dilakukan wawancara terfokus dan mendalam

3.3. Analisis Data

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga PUM dilakukan dengan penentuan skor berdasarkan indikator kesejahteraan (Nasution dan Barizi *dalam* Tahir, 1999). Selanjutnya dari skor tersebut dilakukan penentuan tingkat kesejahteraan dengan metode sebagai berikut :

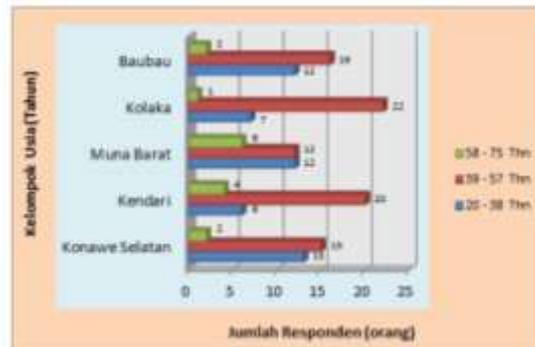
- a. Kurang sejahtera (skor < 52)
- b. Cukup sejahtera (skor 52 – 60)
- c. Sejahtera (skor > 60)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

a. Usia

Usia seseorang sering menjadi faktor penentu produktif atau tidaknya dalam menjalankan suatu usaha. Usia yang relatif muda lebih cenderung produktif jika dibandingkan dengan usia yang sudah tua. Hal ini disebabkan karena alokasi waktu usaha bagi yang berusia muda (produktif) lebih banyak karena didukung kondisi fisik yang masih energik. Disamping itu, dengan usia yang muda lebih cepat dan tanggap dalam menerima serta menerapkan suatu inovasi terutama berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankannya. Sebaliknya seseorang yang telah berusia tua mengalami penurunan alokasi waktu kerja dalam melakukan suatu usaha karena kondisi fisik yang telah mengalami penurunan. Adapun jumlah responden berdasarkan kisaran usianya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah PUM Berdasarkan Kisaran Usia di Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 1, usia Perempuan Usaha Mikro (PUM) sangat bervariasi yakni berkisar antara 20 tahun hingga 75 tahun. Dengan demikian, Kisaran usia PUM dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni antara 20 – 38 tahun, 39 – 57 tahun, dan antara 58 – 75 tahun.

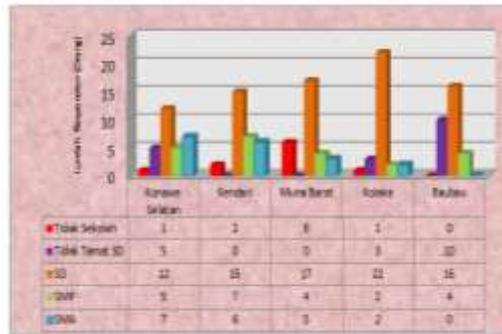
Uraian usia berdasarkan Gambar 1 memperlihatkan produktif atau tidaknya PUM di Sulawesi Tenggara. Meskipun produktivitas usaha berdasarkan batasan usia hingga saat ini sangat beragam menurut para peneliti, dan sering terjadi perbedaan didalam penentuannya, akan tetapi dalam penelitian ini membatasi usia produktif dengan kisaran 15 tahun sampai 57 tahun, sedangkan usia >57 tahun dikategorikan sebagai usia non produktif. Apabila berpedoman pada batasan usia tersebut, maka PUM di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sebagian besar memiliki usia yang masih produktif yakni mencapai 66 persen, dan 34 persen lainnya telah memasuki usia non produktif.

Tingginya angka usia produktif PUM di Sulawesi Tenggara memungkinkan usaha berjalan dengan lebih baik. Apalagi dalam menjalankan usahanya, mereka memperoleh dukungan penuh dari suami karena disamping meringankan pekerjaan suami juga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarganya.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan memegang peranan yang cukup penting bagi PUM dalam mengelola usahanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh diharapkan semakin memiliki kemampuan berpikir yang lebih rasional. Meskipun pendidikan yang pernah ditempuh adalah pendidikan formal dan tidak memiliki keterkaitan dengan usaha mikro yang sedang dijalankan seperti saat penelitian ini, tetapi dengan pendidikan yang memadai akan menjadi modal dasar bagi PUM dalam mengelola usaha serta meningkatkan pendapatannya.

Gambar 2 memperlihatkan keberagaman tingkatan pendidikan formal yang pernah ditempuh PUM di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2015, terdapat sekitar 6 persen PUM yang tidak tamat SD dan bahkan 7 persen lainnya sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini tentu akan berdampak pada rendahnya kemampuan PUM dalam mengelola usahanya. Adapun jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah PUM Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sulawesi Tenggara
Tingkat Pendidikan PUM di Sulawesi Tenggara sebagian besar hanya tamat pada jenjang Sekolah Dasar dengan kisaran 55 persen (83 orang), sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yakni 16 persen. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas dengan kisaran yang hanya mencapai 15 persen atau sebanyak 23 orang.

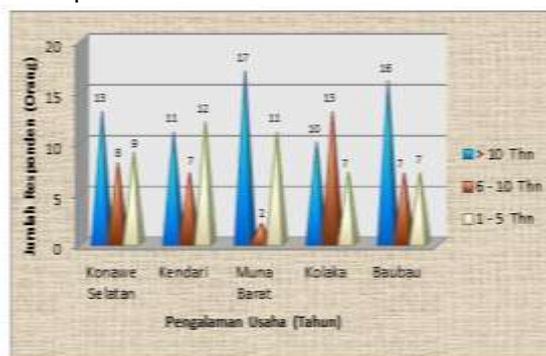
Untuk menunjang keberhasilan PUM dari perspektif pendidikan, maka selain pendidikan formal yang pernah mereka tempuh perlu diupayakan pendidikan-pendidikan non formal untuk bisa menyelaraskan rendahnya tingkat pendidikan formalnya. Pendidikan non formal yang dimaksud dapat berupa pendampingan maupun pelatihan yang sesuai dengan usaha-usaha yang dijalankannya.

c. Pengalaman Usaha

Pengalaman merupakan proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang berjalan secara alamiah serta berkesinambungan pada suatu peristiwa atau aktivitas yang ditekuni selama usaha tersebut berjalan. Seseorang yang tekun serta memfokuskan diri dalam salah bidang usaha akan menjadikan orang tersebut semakin mengenal perkembangan usaha serta langkah terbaik yang harus ditempuh apabila kondisi usahanya dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Keputusan yang difinalkan berkaitan dengan pengelolaan usahanya pun selalu pada posisi yang lebih baik berkat pengalaman serta keaktifannya mengikuti segala perkembangan usaha. Hal inilah yang menjadikan pengalaman seseorang sebagai salah satu potensi penting dan harus dimiliki bila ingin melakukan usaha dalam segala bidang.

Pengalaman PUM di Sulawesi Tenggara berkisar antara 1 tahun hingga 50 tahun dengan rata-rata pengalaman selama 12 tahun. Lamanya pengalaman usaha dalam penelitian ini sebagian besar dipengaruhi oleh usia responden, dimana responden yang berusia tua pengalaman usahanya relatif lama jika dibandingkan dengan responden yang masih berusia muda.

Lamanya pengalaman PUM dibagi dalam tiga kategori yakni antara 1 – 5 tahun, 6 – 10 tahun, dan pengalaman di atas 10 tahun. Hasil penelitian diperoleh bahwa hampir separuh dari responden memiliki pengalaman usaha diatas 10 tahun yakni sebanyak 43 persen. Pengalaman usaha dengan kisaran tersebut memberikan kekuatan bagi PUM untuk mengelola dan mengembangkan usahanya dikarenakan selama menjalankan usaha, PUM akan banyak memperoleh banyak informasi dan inovasi yang diadopsi bagi pengembangan usahanya. Pengalaman PUM dapat dilihat pada Gambar 3



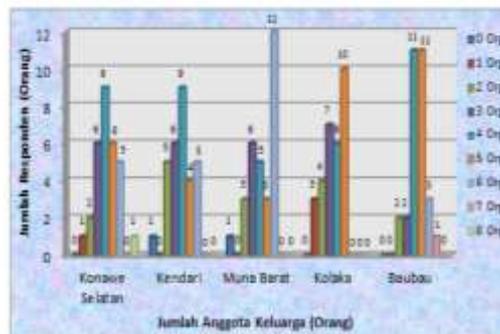
Gambar 3. Jumlah PUM Berdasarkan Pengalaman Usaha di Sulawesi Tenggara

Pengalaman PUM diatas 10 tahun akan menjadi bekal dalam pengembangan usaha, sehingga dengan pengalaman tersebut akan menjadi kekuatan bagi PUM. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kisaran pengalaman antara 6 – 10 tahun yakni 27 persen sedangkan 1 -5 tahun mencapai 31 persen. Perbedaan tingkatan pengalaman PUM memungkinkan adanya perbedaan kemampuan mengelola usaha, informasi dan inovasi yang berkembang. Sehingga pengalaman usaha yang lama bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan usaha, tetapi semampu apa ia mengelola usaha dengan mengikuti dan mengadopsi kemajuan inovasi yang mendukung usahanya.

d. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak dan suami dari PUM di Sulawesi Tenggara. Anggota keluarga bisa menjadi sumberdaya pendukung bagi PUM terutama anak yang telah berusia produktif. Anak yang memasuki usia produktif biasanya akan banyak membantu usaha yang dilakukan kedua orang tuanya, meskipun itu hanya membantu pada saat-saat tertentu. Seorang anak saja akan bisa meringankan usaha, apalagi bisa dilakukan beberapa anak serta bantuan suami. Disamping itu, dukungan dari anak dan suami merupakan alasan utama bagi PUM untuk terus melakukan usahanya dan berupaya meringankan beban suami dalam menafkahi keluarga.

Jumlah anggota keluarga PUM di Sulawesi Tenggara berkisar antara 0 – 8 orang. Disamping Responden yang telah berkeluarga, dalam penelitian ini pula ditemukan adanya PUM yang belum berkeluarga (menikah) yakni sebanyak 3 orang. Sedangkan responden dengan jumlah keluarga terbanyak yakni 8 orang (anak + suami) hanya 1 orang. Adapun jumlah responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Gambar 4.



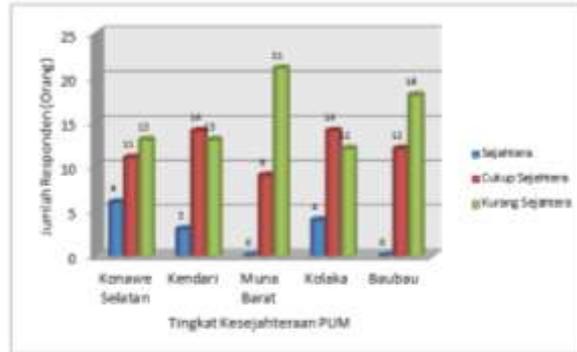
Gambar 4. Jumlah PUM Berdasarkan Banyaknya Anggota Keluarga di Sulawesi Tenggara

Jumlah anggota keluarga PUM di Sulawesi Tenggara lebih didominasi oleh 3 sampai 6 orang anggota keluarga. Sebagai jumlah tertinggi, terdapat 24 persen memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang, 22 persen memiliki anggota keluarga sebanyak 3 orang, 20 persen memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang, dan 17 persen memiliki anggota keluarga sebanyak 6 orang. Keberadaan anggota keluarga yang dinilai banyak tersebut sedikitpun tidak dianggap sebagai beban dalam keluarga, melainkan merupakan anugerah terbesar yang sepatutnya disyukuri. Hal ini terlihat pula didalam keseharian PUM yang senantiasa menjalankan usahanya tanpa memikirkan hal lain selain keberhasilan usahanya dan harapan masa depan yang lebih baik.

4.2. Kesejahteraan Rumah Tangga PUM

Sasaran akhir pembangunan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan pada umumnya disamakan dengan taraf hidup yang berarti pemenuhan konsumsi seorang individu. Dalam konteks umum keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat materil maupun spiritual. Disamping itu keluarga sejahtera mempunyai hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga, dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga PUM dalam penelitian ini diukur berdasarkan berbagai indikator, meliputi: pangan, papan, pemilikan barang, pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB), komunikasi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, serta fasilitas dan aksesibilitas. Tingkat kesejahteraan tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu sejahtera, cukup sejahtera, dan kurang sejahtera. Secara rinci mengenai tingkat kesejahteraan rumah tangga PUM di Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 5

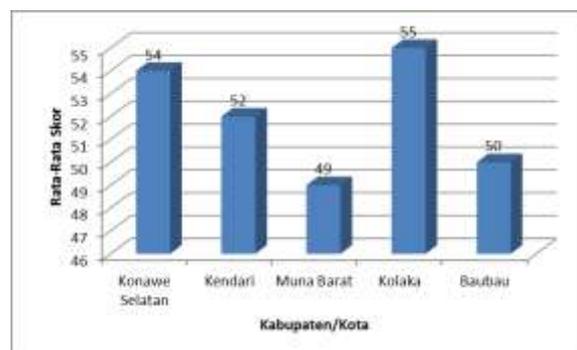


Gambar 5. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga PUM pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga PUM di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk kategori rumah tangga kurang sejahtera, yaitu 77 rumah tangga (51%). Sedangkan rumah tangga PUM yang tergolong cukup sejahtera sebanyak 60 rumah tangga (40%), dan rumah tangga yang tergolong sejahtera hanya 13 (9%). Rumah tangga PUM yang tergolong sejahtera hanya terdapat pada tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Konawe Selatan (6 rumah tangga), Kota Kendari (3 rumah tangga) dan Kabupaten Kolaka (4 rumah tangga), sedangkan di Kabupaten Muna Barat dan Kota Bau-Bau tidak ada rumah tangga PUM yang tergolong sejahtera. Rumah tangga PUM yang tergolong cukup sejahtera sebagian besar berada di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka masing-masing 14 rumah tangga (47%). Sedangkan untuk Kabupaten Muna Barat dan Kota Bau-Bau didominasi oleh rumah tangga PUM yang termasuk kategori kurang sejahtera, yaitu masing-masing 21 rumah tangga (70%) dan 18 rumah tangga (60%).

Tabel 1. Rata-Rata Skor dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga PUM pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Skor	Tingkat Kesejahteraan
1	Konawe Selatan	54	Cukup Sejahtera
2	Kendari	52	Cukup Sejahtera
3	Muna Barat	49	Kurang Sejahtera
4	Kolaka	55	Cukup Sejahtera
5	Baubau	50	Kurang Sejahtera
	Sultra	52	Cukup Sejahtera



Gambar 6. Rata-Rata Skor dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga PUM pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Tabel 1 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa tiga dari lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka rata-rata rumah tangga PUM termasuk kategori cukup sejahtera, sedangkan dua kabupaten/kota sisanya, yaitu Kabupaten Muna Barat dan Kota Baubau rata-rata rumah tangga PUM tergolong kurang sejahtera.

Indikator kesejahteraan yang menjadi faktor utama penyebab rumah tangga PUM di Kabupaten Muna Barat dan Kota Baubau tergolong kurang sejahtera ada tiga, yaitu indikator papan, kesehatan dan interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan indikator papan menunjukkan

rata-rata rumah tangga PUM di Kabupaten Muna dan Kota Baubau memiliki rumah yang sempit, jenis dinding rumah terbuat dari bambu dan tripleks, tidak memiliki tempat mandi, cuci, kakus (MCK), dan sistem pembuangan air limbah yang terbuka. Kemudian berdasarkan indikator kesehatan menunjukkan selama 6 bulan terakhir ada anggota keluarga yang sakit dan tempat berobat rata-rata ke dukun dan puskesmas. Selanjutnya pada indikator interaksi dengan lingkungan menunjukkan partisipasi yang rendah dalam kegiatan gotong-royong, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan PKK, dasawisma dan arisan yang diselenggarakan di lingkungan atau komunitas PUM.

Berbeda dengan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari yang rata-rata rumah tangga PUM tergolong cukup sejahtera, karena indikator papan, kesehatan dan interaksi dengan lingkungan menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga PUM di Kabupaten Muna Barat dan Kota Baubau. Oleh karena itu, secara keseluruhan rumah tangga PUM di Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata tergolong rumah tangga cukup sejahtera. Hal tersebut menunjukkan bahwa PUM memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, walaupun belum mencapai taraf keluarga sejahtera.

Berdasarkan fakta tersebut maka dalam usaha meningkatkan dan menciptakan rumah tangga PUM yang sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dan upaya nyata dengan memperhatikan berbagai indikator kesejahteraan yang ada, khususnya indikator papan, kesehatan dan interaksi dengan lingkungan yang masih rendah. Hal ini seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung dan mudah diakses oleh PUM dalam perbaikan dan peningkatan berbagai indikator kesejahteraan. Dengan demikian maka harapan dan cita-cita untuk meningkatkan dan menciptakan rumah tangga PUM yang sejahtera akan mampu diwujudkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan mengacu pada tujuan penelitian maka simpulan yang diperoleh adalah kesejahteraan PUM masih tergolong rendah. PUM di Sulawesi Tenggara yang telah menikmati hasil usahanya dan telah tergolong sejahtera baru sekitar 9%, sedangkan yang tergolong cukup sejahtera yakni 40%. Jumlah yang lebih besar adalah PUM yang dikategorikan kurang sejahtera dimana angkanya mencapai 51%.

6. REFERENSI

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2003. Rekapitulasi Permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera Per Indikator. Kendari.
- BPS. 2002. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- BPS, 2007. Indonesia dalam Angka. BPS. Jakarta
- BPS, 2006. Sensus Ekonomi 2006. BPS .Kendari
- Djojohadikusumo, S. 1985. Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Depan. LP3ES. Jakarta.
- Poerwadarminto. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Priminingtyas, Dina Novia. 2010. Akses Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Mendapatkan Kredit Usaha Dari Lembaga Perbankan Di Kota Malang. Prosiding Seminar Internasional "The Future of Small Businesses from Accounting, Management and Economics Perspectives" Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Priminingtyas, Dina Novia. 2011. Peran Perempuan dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hasil Penelitian. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan. Bina Grafika. Jakarta.
- Tahir, I. 1999. Analisis Tingkat Kesejahteraan Transmigrasi Pola Nelayan di UPT Lapulu Kota Kendari. Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo. Kendari.
- Tonton, W.S. 1995. Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya. Ekstensia. Jakarta.

